

**EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATENKLATEN 2000 – 2004**

SKRIPSI



ditulis oleh

Nama : JACKY DECYAND
Nomor Mahasiswa : 00313156
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2007

**EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KALTEN
2000-2004**

SKRIPSI

**ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh
gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia**



ditulis oleh

**Nama : Jacky Decyand
Nomor Mahasiswa : 00313156
Program Studi : Ekonomi Pembangunan**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 19 Juni 2007

Penulis,

Jacky Decyand

PENGESAHAN

**EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2000 – 2004**



N a m a : Jacky Decyand
Nomor Mahasiswa : 00313156
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 19 Juni 2007
telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,

Drs. Priyonggo Suseno, M.Sc

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Efisiensi dan Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Klaten 2000-2004

Disusun Oleh: JACKY DECYAND
Nomor mahasiswa: 00313156

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 9 Agustus 2007

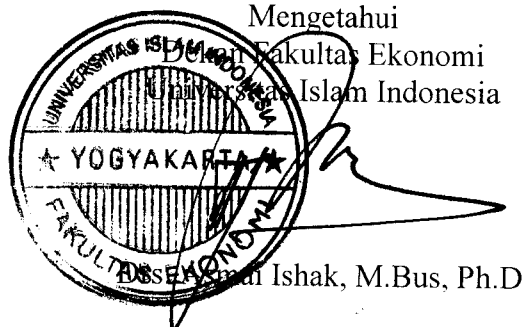
Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Priyonggo Suseno., M.Sc

Penguji I : Drs. Unggul Priyadi, M.Si

Penguji II : Drs. Akhsyim Afandi, MA, Ph.D



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
★ YOGYAKARTA ★
FAKULTAS EKONOMI
Drs. Saiful Ishak, M.Bus, Ph.D



MOTTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(Al-Mujadilah : 11)

Dan dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

(Ibrahim : 34)

Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

(HR. Bukhari No.10)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efisiensi dan Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Klaten Tahun 2000 – 2004”. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis tujukan kepada nabi besar hingga akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umat manusia kepada fitrah yang benar dan jalan yang lurus.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran waktu dan tenaga serta bantuan moril dan materiil khususnya kepada:

1. Bapak Drs. Asma'i Ishak, M.Bus., Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Bapak Drs. Priyonggo Suseno, M.Sc, Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi pengarahan hingga terselesaikannya skripsi ini
3. Bapak Drs. Jaka Sriyana, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik
4. Dosen, staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang turut membantu pelaksanaan penelitian ini

5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten beserta staf yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini
6. Semua pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda kepada Bapak/Ibu dan Saudara semua. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini berguna dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Ujian	iv
Halaman Motto	v
Halaman Kata Pengantar	vi
Halaman Daftar Isi	viii
Halaman Daftar Tabel	xii
Halaman Daftar Gambar	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xv
Halaman Abstrak	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8

BAB II	TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN	10
2.1	Keadaan Geografis	10
2.2	Keadaan Penduduk	11
2.3	Keadaan Perekonomian	14
2.4	Pajak dan Retribusi Daerah	15
2.5	Gambaran Umum Tentang Pajak dan Retribusi Yang Akan Diteliti	18
2.5.1	Pajak Hotel dan Restoran	18
2.5.2	Pajak Reklame	19
2.5.3	Pajak Hiburan	20
2.5.4	Retribusi Kebersihan	20
BAB III	KAJIAN PUSTAKA	22
3.1	Peranan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	22
3.2	Peranan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah	23
3.3	Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah...	24
BAB IV	LANDASAN TEORI	26
4.1	Pendapatan Asli Daerah	26
4.1.1	Pengertian Pendapatan Asli Daerah	26
4.1.2	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	26
4.2	Otonomi Daerah (UU No.22 Tahun 1999)	28
4.3	Pajak Daerah	28

4.4	Retribusi Daerah	31
4.4.1	Pengertian Retribusi Daerah	31
4.4.2	Tujuan dan Manfaat Retribusi Daerah	35
4.4.3	Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah	36
4.5	Pengertian Efisiensi dan Efektivitas	38
BAB V METODE PENELITIAN		42
5.1	Desain Penelitian	42
5.2	Variabel Penelitian	43
5.3	Metode Analisis	43
5.4	Sampel Penelitian	46
5.5	Data dan Sumber Data	47
BAB VI ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		48
6.1	Analisis Tingkat Pertumbuhan Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000-2004	48
6.1.1	Tingkat Pertumbuhan Kinerja Pajak Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000-2004	49
6.1.2	Tingkat Pertumbuhan Kinerja Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000-2004	52
6.2	Analisis Efisiensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000-2004	54
6.3	Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah	

	Kabupaten Klaten Tahun 2000-2004	58
6.3.1	Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000-2004	59
6.3.2	Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000-2004	62
6.3.3	Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000-2004	65
6.4	Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000-2004	67
BAB VII	KESIMPULAN DAN SARAN	68
7.1	Kesimpulan	68
7.2	Saran	69
	Daftar Pustaka	71
	Lampiran	73

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2003 – 2004 (Dalam Rupiah)	3
2.1 LUAS WILAYAH MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2004	11
2.2 JUMLAH PENDUDUK DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN KLATEN TAHUN 1978 – 2004	12
2.3 JUMLAH PENDUDUK DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2004	13
2.4 PERKEMBANGAN PDRB PER KAPITA KABUPATEN KLATEN TAHUN 1994 – 2003	15
2.5 REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PAD DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2002 – 2004 (Rupiah)	16
2.6 REALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2004	16
2.7 POS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2004	17
6.1 PERTUMBUHAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2000 – 2004	49

6.2	PERTUMBUHAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	
	KABUPATEN KLATEN TAHUN 2000 – 2004	52
6.3	BIAYA PUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	KABUPATEN KLATEN TAHUN 2000 – 2004	56
6.4	TINGKAT EFISIENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	KABUPATEN KLATEN TAHUN 2000 – 2004	56
6.5	TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH	
	KABUPATEN KLATEN PERIODE TAHUN 2000 – 2004	59
6.6	TINGKAT EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAERAH	
	KABUPATEN KLATEN PERIODE TAHUN 2000 – 2004	62
6.7	TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	KABUPATEN KLATEN PERIODE TAHUN 2000 – 2004	66
6.8	REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	
	KABUPATEN KLATEN PERIODE TAHUN 2000 – 2004	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
6.1 GRAFIK PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH KABUPATEN KLATEN PERIODE TAHUN 2000 – 2004	51
6.2 GRAFIK PERTUMBUHAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KLATEN PERIODE TAHUN 2000 – 2004	54
6.3 GRAFIK TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2000 – 2004	60
6.4 GRAFIK TINGKAT EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2000 – 2004	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I	Perhitungan Pertumbuhan Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Periode Tahun 2000 – 2004 73
II	Perhitungan Rasio Efisiensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Periode Tahun 2000 – 2004 75
III	Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Periode Tahun 2000 – 2004 76
IV	Perhitungan Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Periode Tahun 2000 – 2004 79

ABSTRAK

Pembangunan adalah usaha manusia dalam mencapai kesejahteraan dan merupakan tugas negara untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kesinambungan pembangunan. Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Mengingat anggaran yang harus dicukupi oleh pemerintah daerah dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, maka perlu diupayakan untuk meningkatkan jumlah penerimaan yang semakin meningkat pula. Dengan meningkatnya jumlah penerimaan, diharapkan realisasi pajak daerah dapat meningkat yang selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan keuangan yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah daerah.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten dari tahun 2000 – 2004. Selain itu, tujuan lain yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan kinerja pajak dan retribusi daerah serta mengetahui jenis pajak dan retribusi daerah yang memberikan potensi terbesar di Kabupaten Klaten dari tahun 2000 – 2004.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya yang digunakan untuk mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2000 – 2004 dapat dikategorikan efisien dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Klaten periode tahun 2000 - 2004 dapat dikategorikan efektif. Adapun pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Klaten periode tahun 2000 – 2004 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat. Sedangkan jenis pajak dan retribusi daerah yang memberikan potensi terbesar di Kabupaten Klaten dari tahun 2000 – 2004 adalah pajak reklame (32,07%) dan retribusi parkir (32,24%).

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah usaha manusia dalam mencapai kesejahteraan dan merupakan tugas negara untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kesinambungan pembangunan. Pembangunan di segala bidang perlu ditingkatkan guna mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal pembangunan, pemerintah pusat tidak lepas tangan terhadap pembangunan yang ada di daerah yang menjadi wewenang daerah. Dengan kata lain bahwa pemerintah pusat dan daerah masih ada jalinan hubungan. Jalinan ini salah satunya adalah dalam hal sistem keuangan seperti dalam UU RI No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah bersumber dari pendapatan asli daerah dan penerimaan dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dengan demikian kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan anggarannya merupakan usaha yang perlu terus ditingkatkan agar dapat membiayai setidaknya biaya operasional dan permintaan daerah (anggaran rutin). Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi.

Adanya penyelenggaraan otonomi daerah yaitu dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keaneka ragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sumber pendapatan daerah perlu ditingkatkan dengan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang menekankan supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan tepat dengan diberikan sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka daerah diwajibkan menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan daerah, pasal 79 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi:
 1. Hasil Pajak Daerah
 2. Hasil Retribusi Daerah
 3. Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - b. Dana Perimbangan
 - c. Pinjaman Daerah
 - d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan demikian, dari sumber-sumber pendapatan di atas yang telah disebutkan, maka pajak daerah merupakan salah satu sumber-sumber pendapatan daerah. Pajak daerah pengelolaannya dilakukan oleh daerah melalui dinas daerah dan dapat dilakukan terus menerus. Di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sumber-sumber pendapatan daerah menggunakan format yang agak berlainan, namun secara garis besar pada pokoknya sama. Di bawah ini akan disajikan contoh tabel tentang jenis sumber pendapatan daerah di Kabupaten Klaten untuk tahun anggaran 2003-2004.

TABEL 1.1
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2003-2004
(Dalam Rupiah)

No.	Jenis pendapatan	Tahun 2003	Tahun 2004
1	Pos Pajak Daerah	8.605.562.041	10.291.535.387
2	Pos Retribusi Daerah	7.720.125.608	8.506.221.694
3	Pos Bagian Laba BUMD	1.146.406.000	1.195.358.000
4	Pos Lain-lain PAD yang Sah	4.805.705.515	7.085.027.849
	JUMLAH A (BAGIAN PAD)	22.277.799.164	27.078.142.930
5	Pos Bagi Hasil Pajak	21.993.885.243	24.408.273.496
6	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	671.911.144	737.883.964
	JUMLAH B (BAG.DANA PERIMBANGAN)	22.665.796.387	25.146.157.460
7	Dana Alokasi Umum	409.386.136.000	382.345.000.000
	JUMLAH C (BAG. DAU)	409.386.136.000	382.345.000.000
8	Alokasi ABT- Bencana Alam	3.750.000.000	0
	JUMLAH D (POS DANA DARURAT)	3.750.000.000	0
9	Pos Dana Alokasi Khusus	3.710.000.000	10.030.000.000
	JUMLAH E (DANA ALOKASI KHUSUS)	3.710.000.000	10.030.000.000

TABEL 1.1 (lanjutan)
 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLATEN
 TAHUN ANGGARAN 2003-2004
 (Dalam Rupiah)

No.	Jenis pendapatan	Tahun 2003	Tahun 2004
10	Pos Penerimaan Dari Propinsi	16.689.803.746	24.378.474.327
	JUMLAH F (BANTUAN DARI PROPINSI)	16.689.803.746	24.378.474.327
11	Pos Penerimaan Dari Pem.Pusat	0	32.948.847.000
	JUMLAH G (PEND DARI PEM. PUSAT)	0	32.948.847.000
12	Pos Urusan Kas dan Perhitungan	33.254.022.345	0
	JUMLAH H (BAG. KAS & PERHITUNGAN)	33.254.022.345	0
	JUMLAH SEMUA (A+B+C+D+E+F+G+H)	511.733.557.642	501.926.621.717

Sumber: BAPEDA Kabupaten Klaten

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten mengalami penurunan. Kabupaten Klaten secara terus menerus berupaya keras untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah bagi kabupaten itu sendiri sehingga dengan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah akan mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan akan memberikan kontribusi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan, maka semakin banyak fasilitas maupun jasa yang perlu disediakan oleh pemerintah Kabupaten Klaten untuk menunjang kegiatan perekonomian.

Adapun enam jenis Pajak Daerah yang tercantum dalam dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (sebelumnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1983) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, yaitu:

1. Pajak Hotel dan Restoran

2. Pajak Reklame
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Penerangan Jalan Umum
5. Pajak Bahan Galian C
6. Pajak air Bawah Tanah Dan Air Permukaan.

Mengingat anggaran yang harus dicukupi oleh pemerintah daerah dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, maka perlu diupayakan untuk meningkatkan jumlah penerimaan yang semakin meningkat pula. Dengan meningkatnya jumlah penerimaan, diharapkan realisasi pajak daerah dapat meningkat yang selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan keuangan yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah daerah.

Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang didalamnya memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Pengukuran kinerja pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan untuk melihat seberapa jauh peningkatan dari tahun ke tahun. Sehubungan dengan itu, maka dalam penulisan skripsi ini akan membahas efisiensi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten tahun 2000 sampai tahun 2004.

1.2 Rumusan Masalah

Selanjutnya dalam merumuskan masalah dalam penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten dari tahun 2000 – 2004
2. Bagaimana tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten dari tahun 2000 – 2004
3. Bagaimana tingkat perkembangan kinerja pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten dari tahun 2000 – 2004
4. Jenis pajak apakah yang memberikan kontribusi terbesar di Kabupaten Klaten dari tahun 2000 – 2004
5. Retribusi apakah yang memberikan kontribusi terbesar di Kabupaten Klaten dari tahun 2000 – 2004

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilaksanakan ini tidak terlalu melebar cakupannya, selanjutnya perlu diadakan pembatasan masalah tentang pajak dan retribusi yang diteliti. Selanjutnya pajak daerah dan retribusi yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Pajak hiburan
2. Pajak hotel dan Restoran
3. Pajak reklame
4. Retribusi kebersihan
5. Retribusi parkir

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian antara lain:

1. Mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten dari tahun 2000 – 2004.
2. Mengetahui tingkat perkembangan kinerja pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten dari tahun 2000 – 2004.
3. Mengetahui jenis pajak dan retribusi daerah yang memberikan kontribusi terbesar di Kabupaten Klaten dari tahun 2000 – 2004.

1.5 Manfaat Penelitian

Ditinjau dari manfaatnya, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat bagi penulis, pemerintah daerah dan berbagai pihak lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan berbagai pengetahuan dan teori yang diperoleh di bangku perguruan tinggi, khususnya yang berhubungan dengan masalah pengukuran kinerja pajak dan retribusi daerah serta pertumbuhannya. Penelitian ini juga dapat dijadikan studi banding dengan penelitian lain dengan topik yang sama

2. Bagi pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan suatu keputusan dalam kebijakan yang berhubungan dengan

masalah pengukuran kinerja pajak dan retribusi daerah serta pertumbuhan kinerja pajak dan retribusi daerah

3. Bagi pihak lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengetahuan bagi pihak lain untuk mempelajari masalah pengukuran kinerja pajak dan retribusi daerah serta pertumbuhan kinerja pajak dan retribusi daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

Berisi gambaran umum mengenai daerah penelitian yang terdiri dari keadaan geografis, keadaan demografi, luas wilayah, kondisi penduduk, kondisi perekonomian di Kabupaten Klaten serta gambaran umum tentang pajak dan retribusi yang akan diteliti.

BAB III KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dan referensi awal dalam penelitian. Penelitian-penelitian tersebut meneliti tentang efisiensi dan efektivitas pajak dan retribusi daerah dengan daerah penelitian yang berbeda-beda.

BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas pajak dan retribusi daerah serta undang-undang yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah.

BAB V METODE PENELITIAN

Menguraikan analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja pajak dan retribusi daerah yang diteliti oleh penulis.

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi semua temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis.

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

2.1 Keadaan Geografis

Wilayah Kabupaten Klaten terletak antara $110^{\circ}30'$ - $110^{\circ}45'$ BT dan $7^{\circ}30'$ - $7^{\circ}45'$ LS. Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Klaten adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
- Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DI Yogyakarta)
- Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta).

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran:

- Sebelah Utara : Dataran lereng Gunung Kidul
- Sebelah Timur : Membujur dataran rendah
- Sebelah Selatan : Dataran Gunung Kapur.

TABEL 2.1
LUAS WILAYAH MENURUT KECAMATAN
DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2004

No.	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah (Km ²)
1	Prambanan	16	24,43
2	Gantiwarno	16	25,64
3	Wedi	19	24,38
4	Bayat	18	39,43
5	Cawas	20	34,47
6	Trucuk	18	33,81
7	Kalikotes	7	12,98
8	Kebonarum	7	9,67
9	Jogonalan	18	26,07
10	Manisrenggo	16	26,96
11	Karangnongko	14	26,74
12	Ngawen	13	16,97
13	Ceper	18	24,45
14	Pedan	14	19,17
15	Karangdowo	19	29,23
16	Juwiring	19	29,79
17	Wonosari	18	31,14
18	Delanggu	16	18,78
19	Polanharjo	18	23,84
20	Karanganom	19	24,06
21	Tulung	18	32,00
22	Jatinom	17	35,53
23	Kemalang	13	51,66
24	Klaten Selatan	11	14,43
25	Klaten Tengah	3	8,92
26	Klaten Utara	6	10,38
Jumlah		391	655,56

Sumber : BPS Kabupaten Klaten

2.2 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten tahun 2004 sebesar 1.281.786 jiwa. Ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,35% bila dibanding dengan tahun 2003. Berikut ini perincian jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Klaten dari tahun 1978 – 2004.

TABEL 2.2
JUMLAH PENDUDUK DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
KABUPATEN KLATEN TAHUN 1978 – 2004

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (Jiwa)	Persentase
1978	1.064.244	3895	0,37
1979	1.075.201	10957	1,02
1980	1.086.307	11106	1,02
1981	1.101.295	14988	1,36
1982	1.112.535	11240	1,01
1983	1.124.869	12334	1,1
1984	1.138.542	13673	1,2
1985	1.149.171	10269	0,89
1986	1.154.788	5617	0,49
1987	1.161.255	6437	0,55
1988	1.166.618	5393	0,46
1989	1.172.976	6358	0,54
1990	1.179.047	6071	0,51
1991	1.184.619	5572	0,47
1992	1.189.964	5345	0,45
1993	1.196.504	6537	0,55
1994	1.202.742	6241	0,52
1995	1.216.009	13267	1,09
1996	1.223.439	7430	0,61
1997	1.228.640	5201	0,42
1998	1.234.113	5473	0,44
1999	1.242.711	8598	0,69
2000	1.257.682	14971	1,19
2001	1.265.295	7613	0,6
2002	1.271.430	6235	0,49
2003	1.277.297	5767	0,45
2004	1.281.786	4489	0,35

Sumber: BPS Kabupaten Klaten

TABEL 2.3
JUMLAH PENDUDUK DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2004

No	Kecamatan	2003	2004	Penambahan Penduduk(Jiwa)	Laju Pertumbuhan(%)
1	Prambanan	44.927	45.583	656	1,44
2	Gantiwarno	40.217	40.494	277	0,68
3	Wedi	54.752	54.887	135	0,25
4	Bayat	63.675	63.798	123	0,19
5	Cawas	64.741	64.695	-45	-0,07
6	Trucuk	78.685	79.198	513	0,65
7	Kalikotes	36.342	36.521	178	0,49
8	Kebonarum	21.197	21.206	9	0,04
9	Jogonalan	57.118	57.368	250	0,44
10	Manisrenggo	40.966	41.197	231	0,56
11	Karangnongko	37.903	38.046	143	0,38
12	Ngawen	43.633	43.734	101	0,23
13	Ceper	63.201	63.447	246	0,39
14	Pedan	47.872	47.836	-36	-0,08
15	Karandowo	51.585	51.659	74	0,14
16	Juwiring	61.477	61.436	-41	-0,07
17	Wonosari	61.533	61.699	166	0,27
18	Delanggu	44.333	44.381	48	0,11
19	Polanharjo	45.258	45.458	200	0,44
20	Karanganom	49.088	49.075	-13	-0,03
21	Tulung	54.471	54.569	189	0,35
22	Jatinom	56.618	56.811	193	0,34
23	Kemalang	34.604	34.772	168	0,48
24	Klaten Selatan	39.854	40.221	366	0,91
25	Klaten Tengah	43.177	43.355	178	0,41
26	Klaten Utara	40.072	40.252	180	0,45
	JUMLAH	1.277.297	1.281.786	4.489	0,35

Dari Tabel 2.3 diatas dapat dilihat bahwa tahun 2004 kecamatan yang terbanyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Trucuk dengan jumlah penduduk 79.198 jiwa dari penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten. Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Kebonarum dengan jumlah penduduk 21.206 jiwa.

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan (persentase) maka Kecamatan Delanggu memiliki laju pertumbuhan penduduk yang terkecil yaitu 0,11% dan kecamatan yang tingkat kepadatannya paling tinggi adalah Kecamatan Prambanan dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,44%. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk adalah 0,35%.

2.3 Keadaan Perekonomian

Pembangunan daerah berbagai bidang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan distribusi pendapatan yang lebih merata melalui kesempatan kerja yang lebih luas. Oleh karena itu pembangunan harus memfokuskan pada pemerataan produksi dan stabilitas daerah.

Struktur ekonomi secara kuantitatif bisa digambarkan dengan menghitung besarnya persentase peranan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor terhadap nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam menghitung nilai PDRB untuk setiap sektor tersebut berdasarkan atas harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku berarti menghitung nilai tambah faktor produksi berdasarkan atas harga pada tahun yang bersangkutan. Nilai PDRB atas harga berlaku ini menggambarkan perkembangan volume produksi dan perubahan

tingkat harga. Harga yang dipakai sebagai dasar penghitungan merupakan harga yang diterima produsen. Sedangkan harga konstan yaitu menilai faktor produksi atas harga pada tahun dasar, yaitu harga tahun 1994. Dari nilai konstan ini akan tergambar tingkat produktivitas dan kapasitas produksi untuk setiap lapangan usaha. PDRB atas dasar harga konstan dipakai sebagai dasar penilaian pertumbuhan ekonomi regional. Dalam praktek penghitungannya PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung dengan cara revaluasi, ekstrapolasi dan deflasi. Untuk mengetahui perkembangan PDRB di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2.4
PERKEMBANGAN PDRB PER KAPITA KABUPATEN KLATEN
TAHUN 1994 - 2003

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Nilai (Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1994	991.834,25	14,47	913.951,90	5,48
1995	1.090.805,94	9,98	972.613,60	6,42
1996	1.206.209,65	10,58	1.033.040,87	6,21
1997	1.386.053,24	14,91	1.055.812,65	2,20
1998	1.950.313,81	40,71	932.344,05	-11,69
1999	2.182.299,30	11,89	933.040,23	0,07
2000	2.351.122,47	7,74	956.415,71	2,51
2001	2.656.401,06	12,98	988.745,71	3,38
2002	3.068.266,67	15,50	1.017.789,50	2,94
2003	3.365.344,83	9,68	1.053.576,55	3,52

Sumber: BPS Kabupaten Klaten

2.4 Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD di Kabupaten Klaten yang memiliki peran yang cukup besar dalam menunjang

pembangunan yang sedang dilaksanakan. Penerimaan dan pengeluaran PAD di Kabupaten Klaten dapat dilihat dalam tabel 2.5 berikut ini.

TABEL 2.5
REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PAD
DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2002 – 2004
(Rupiah)

No	Jenis Penerimaan	2002	2003	2004
1	Penerimaan Daerah	407.282.401.984	536.558.035.724	517.922.150.974
2	Pengeluaran rutin	354.501.066.977	483.855.113.000	495.106.015.401
3	Pendapatan Asli Daerah	17.436.941.399	22.288.967.164	27.177.367.787
4	Pengeluaran Pembangunan	46.809.359.245	111.533.537.000	116.012.775.354

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan melihat Tabel 2.5 dapat diketahui PAD Kabupaten Klaten pada tahun 2002 sebesar Rp.17.436.941.399 terus meningkat sampai tahun 2004 sebesar Rp.27.177.367.787. Dengan melihat peningkatan PAD tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten hendaknya tetap mempertahankan peningkatan PAD untuk tahun berikutnya. Jenis pajak yang berpengaruh serta mempunyai peran penting dalam PAD dapat dilihat dalam tabel 2.6 berikut ini.

TABEL 2.6
REALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2004

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Persentase
1	Pajak Daerah	10.015.000.000	10.291.535.387	102,76
2	Retribusi Daerah	9.051.498.000	8.613.692.694	95,16
3	Bagian Laba BUMD	1.291.000.000	1.195.385.000	92,59
4	Penerimaan Lain-lain	5.487.362.000	7.085.027.849	129,12
Total		25.844.860.000	27.185.640.930	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa pajak dan retribusi daerah mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Klaten. Untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten, maka Pemerintah Dati II Klaten mengelompokkan pos pajak dan retribusi daerah menjadi beberapa jenis pajak. Untuk mengetahui pos pajak dan retribusi daerah yang berlaku di Kabupaten Klaten, dapat dilihat dalam tabel 2.7 berikut ini.

TABEL 2.7
POS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2004

No	Pajak Daerah	No	Retribusi Daerah
1	PajakHotel	1	Pelayanan kesehatan
2	Pajak Restoran	2	Pelayanan kebersihan
3	Pajak Hiburan	3	Biaya cetak KTP & Akte Capil
4	Pajak Reklame	4	Pelayanan pemakamam dan penguburan
5	Pajak Penerangan Jalan	5	Parkir di tepi jalan umum
6	Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Gol C	6	Retribusi pasar
7	Pajak Parkir	7	Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8		8	Pemakaian kekayaan daerah
9		9	Retribusi terminal
10		10	Rumah potong hewan
11		11	Tempat rekreasi dan olah raga
12		12	Penjualan produksi daerah
13		13	Ijin mendirikan bangunan
14		14	Ijin pengusaha angkutan umum
15		15	Ijin tempat usaha
16		16	Keramaian umum
17		17	SIUP
18		18	Ijin Pennyelenggaraan Bidang Pariwisata
19		19	Ijin Gangguan
20		20	Ijin Bidang Kesehatan
21		21	Pasar Grosir Dan Pertokoan
22		22	Ijin Trayek

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten, 2004

2.5 Gambaran Umum Tentang Pajak dan Retribusi

2.5.1 Pajak Hotel dan Restoran

Dalam Perda Kabupaten Klaten No 11 Tahun 2000 tentang pajak hotel dan restoran yaitu:

- 1) Pajak hotel dan restoran dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel ataupun restoran.
- 2) Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel ataupun restoran termasuk
 - a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
 - b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
 - c) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum.
 - d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
 - e) Jasa penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.
- 3) Dikecualikan dari obyek pajak
 - a) Persewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
 - b) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.

- c) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan dihotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
 - d) Pertokoan, perkantoran, bank, salon yang dipakai oleh umum dihotel.
 - e) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
 - f) Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas yang ditentukan oleh daerah.
- 4) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel ataupun restoran.
- 5) Wajib pajak adalah pengusaha hotel ataupun restoran

2.5.2 Pajak Reklame

Obyek dan subyek pajak reklame antara lain:

- a. Obyek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- b. Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.
- c. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Dasar dari pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa dari reklame tersebut. Sedangkan nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame tersebut.

Perhitungan potensi dilakukan melalui survey terhadap obyek pajak reklame diseluruh Kabupaten Klaten. Kemudian dilakukan inventarisasi terhadap reklame yang langsung terpasang dengan pengembangan informasi mengenai nilai pembuatan reklame tersebut. Dari informasi nilai pembuatan reklame kemudian dikalikan dengan kuantum, dalam hal ini kuantum terdiri dari bobot lama pemasangan, nilai jaringan jalan, nilai lokasi dan nilai sudut pandang.

2.5.3 Pajak Hiburan

Pajak hiburan di Kabupaten Klaten berasal dari beberapa sumber diantaranya:

- a. Perayaan tradisional
- b. Olahraga / insiden
- c. *Video game / play station*
- d. Persewaan VCD

2.5.4 Retribusi Kebersihan

PP No.66 Tahun 2001 pada Bab I mengatur mengenai ketentuan umum retribusi daerah dan pelayanan kebersihan. Pada Perda Kabupaten Klaten No. 39 Tahun 2001 tentang pengelolaan dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dijelaskan mengenai nama, obyek dan subyek pelayanan persampahan/kebersihan.

- a. Obyek retribusi adalah barang-barang yang merupakan kotoran yang berasal dari rumah tangga, toko, kantor, bengkel, perusahaan, rumahsakit,

asrama, pasar, sekolah, tempat pertunjukan dan bangunan tempat lain beserta halamannya. Pelayanan yang disediakan atau diberikan meliputi:

- a. Penyediaan bak-bak sampah sebagai tempat penampungan sementara sampah.
 - b. Penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir sampah.
 - c. Pengambilan, pengangkutan, pembuangan ke TPA dan pemusnahan sampah.
- b. Subyek pajak pelayanan persampahan/kebersihan meliputi semua orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, menggunakan, memperoleh manfaat dari jasa pelayanan persampahan/kebersihan dan bertanggungjawab atas tanah dan bangunan yang bersangkutan.

BAB III KAJIAN PUSTAKA

3.1 Peranan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Skripsi yang berjudul "Peranan Pajak Penerangan Jalan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Asli Daerah di Kabupaten Bantul" ditulis pada tahun 2001 oleh Hari Kristiawan menemukan hasil bahwa pertumbuhan pajak penerangan jalan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 terjadi kenaikan sebesar 37,00% dan tahun 1997 mengalami penurunan 31,50%, maka diperoleh rata-rata pertumbuhan pajak penerangan jalan sebesar 21,05%.

Penelitian ini menggunakan alat analisis kontribusi, efektivitas dan efisiensi. Alat ukur yang digunakan adalah rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Tingkat efektifitas pajak penerangan jalan tahun 1995 sampai dengan 1999 selalu diatas atau lebih besar dari rata-rata tingkat keefektifan di Kabupaten Bantul 1,07%. Hal ini karena realisasi pajak penerangan jalan lebih besar dari penerimaan yang ditargetkan, sehingga dikatakan sudah cukup efektif. Selain itu biaya pemungutan pajak penerangan jalan yang lebih rendah dari realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dapat memenuhi target maksimum.

Skripsi yang berjudul "Peranan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 1993/1994-1999/2000" ditulis pada tahun 2003 oleh Yudi Andri Cahyono menemukan hasil bahwa rata-rata kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah selama 7 (tujuh) tahun dari tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan tahun 1999/2000 cukup besar yaitu 71,62%.

Penelitian ini menggunakan alat analisis kontribusi, efisiensi, efektivitas dan analisis trend linier. Tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak penerangan jalan yang dihitung berdasarkan data tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan tahun 1999/2000 cukup efisien dan efektif. Besarnya tingkat efisiensi 25,19% sedang tingkat efektifitas sebesar 87,25%. Dikatakan efisien jika tingkat efisiensi menunjukkan angka yang kecil atau mendekati 1%, tingkat efisiensi 25,19% dapat dikatakan kurang efisien. Tingkat efektifitas dikatakan efektif jika tingkat efektifitas mendekati 100%, berarti tingkat efektifitas 87,25 dapat dikatakan efektif. Hasil perhitungan prediksi peramalan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 adalah pada tahun 2003 diperkirakan sebesar Rp.1.065.052.928. Selanjutnya tahun 2004 akan mencapai Rp.1.191.687.678. Pada tahun 2005 sebesar Rp.1.318.223.448. Sementara pada tahun 2006 akan mencapai Rp.1.444.958.967.178 dan pada akhir tahun 2007 sebesar Rp.1.571.594.510.928.

3.2 Peranan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Skripsi yang berjudul "Peranan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kodya Dati II Kendari" ditulis oleh Sarmin menemukan hasil bahwa peranan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode 1992/1993-1996/1997 adalah sebesar 17,97%.

Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan perhitungan kontribusi, efisiensi dan efektivitas. Efisiensi retribusi pasar berkisar antara 15,24% - 18,48% dengan rata-rata 16,67% tiap tahun atau bisa dikatakan cukup efisien. Efektivitas retribusi

pasar di Kodya Dati II Kendari rata-rata 84,11% dengan efektifitas tertinggi sebesar 88,98% pada tahun 1996/1997 dan itu bisa dikatakan sangat efektif.

Skripsi yang berjudul “Peranan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang” ditulis oleh Fitriyah Nurlaili menemukan hasil bahwa berdasarkan perhitungan efisiensi retribusi pasar di Kabupaten Jombang terlihat cukup efisien. Pada tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2002 efisiensinya tidak mengalami kenaikan yaitu tetap sebesar 2,99%, tingkat efisiensi ini digolongkan dalam tingkat yang sangat efisien. Dan ini berarti bahwa hanya 2,99% yang dikeluarkan sebagai biaya pemungutan dari total realisasi penerimaan retribusi pasar tersebut.

3.3 Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Skripsi yang berjudul “Peranan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sukoharjo” ditulis oleh Iwan mengambil kesimpulan bahwa rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah tahun anggaran 1994/1995-2004 adalah sebesar 1,87%, dimana kontribusi pajak hotel dan restoran terbesar terjadi pada tahun 1995/1996 sebesar 2,29%.

Efisiensi pajak hotel dan restoran Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 1994/1995-2004 diperoleh angka rata-rata sebesar 9,34%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pungutan pajak hotel dan restoran Kabupaten Sukoharjo cukup efisien karena nilai efisiensi 9,34% kurang dari 100%. Rata-rata efektivitas pajak hotel dan restoran Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 1994/1995-2004

adalah sebesar 109,13%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran Kabupaten Sukoharjo efektif karena nilai efektifitas pajak hotel dan restoran 109,13% diatas angka 100%.

Hasil dari perhitungan prediksi peramalan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2005-2009 adalah pada tahun 2005 diprediksikan sebesar Rp.200.367.311,4; tahun 2006 akan mencapai Rp.220.945.730,7; tahun 2007 sebesar Rp.241.524.150; tahun 2008 sebesar Rp.262.102.569,3; sedangkan tahun 2009 sebesar Rp.282.680.988,7.

BAB IV LANDASAN TEORI

4.1 Pendapatan Asli Daerah

4.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dan untuk membiayai pembangunan daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab.

Jadi pengertian Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah (Departemen Keuangan, RI 1998: 352). Dengan Pendapatan Asli Daerah yang kuat maka akan terwujud otonomi daerah yang mantap karena dapat membiayai keperluan daerah dari penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri.

4.1.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintah daerah bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah:

a. **Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan pada semua objek pajak seperti orang atau badan.

b. **Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian karena memperoleh jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata oleh daerah.

c. **Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Bagian laba BUMD merupakan penerimaan yang berupa bagian laba BUMD, yang terdiri dari laba Bank Pembangunan Daerah dan bagian laba BUMD lainnya.

d. **Penerimaan dari Dinas-dinas Daerah**

Adalah penerimaan dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi pajak. Misalnya: pertanian, peternakan, kesehatan dan lain-lain.

e. **Penerimaan Lain-lain**

Adalah penerimaan selain digambarkan di atas. Yang termasuk rincian ini antara lain: hasil penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan roda empat dan roda dua, cicilan rumah yang diterima oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa giro dan penerimaan lain-lain yang sah.

4.2 Otonomi Daerah

Hal-hal yang mendasar dalam UU No. 22 Tahun 1999 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga Undang-undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten.

Dalam Undang-undang ini, daerah propinsi adalah otonomi dan sekaligus wilayah administrasi yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang merupakan pemerintah atasan dari daerah kabupaten dan daerah kota. Sehingga otonomi propinsi dan daerah kabupaten serta daerah kota tidak mempunyai hubungan hirarki. Dengan pengalaman otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata bertanggung jawab dengan penekananan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban dari hak, maka dalam UU No. 22 Tahun 1999 ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, bertanggung jawab (Undang-undang Otonomi Daerah, 1999: 45 – 46).

4.3 Pajak Daerah

Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 1989 dalam Mardiasmo, 2002: 1).

Berdasarkan atas pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur berikut (Mardiasmo, 2002: 1)

- a. Iuran rakyat kepada negara, artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang.
- b. Berdasarkan UU, pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan UU yang disertai dengan aturan pelaksanaannya.
- c. Negara tidak memberikan jasa timbal balik atau kontraprestasi terhadap para pembayar pajak.
- d. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Berdasarkan teori pajak mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pendorong fungsi *budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya dan fungsi mengatur (*regulera*) bahwasanya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus adil, berdasarkan UU, tidak mengganggu perekonomian, efisien dan sederhana. Kemudian yang dimaksud dengan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk (Suparmoko, 1990: 94).

Selanjutnya dalam pasal 1 UU No 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi/badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah kabupaten/kota yang dapat dipungut oleh pemerintah jumlahnya ada 7 jenis pajak, yaitu:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g) Pajak parkir

Disamping jenis pajak daerah tersebut diatas, dengan peraturan daerah pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan jenis pajak daerah lainnya selama memenuhi kriteria sebagai berikut (UU No. 34 Tahun 2000, pasal 2 ayat 4)

- a) Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- b) Obyek pajak terletak/terdapat di wilayah daerah/kabupaten yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d) Potensinya memadai.
- e) Tidak memberikan dampak ekonomi negatif dan memperhatikan dampak ekonomi yang negatif.
- f) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

- g) Menjaga kelestarian lingkungan.

4.4 Retribusi Daerah

4.4.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 yang diperbaharui dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang/badan. Dalam retribusi berlaku asas pengecualian yaitu bagi yang tidak menikmati barang atau jasa pemerintah dikecualikan dari pungutan tersebut (Musgrave, 1990).

Jadi retribusi lebih menyerupai harga dalam proses jual beli secara bebas. Akan tetapi retribusi bukan merupakan seluruh harga barang atau jasa yang dinikmati oleh pembayar retribusi sebagai pajak yang bersifat khusus. Retribusi juga harus berdasarkan UU/peraturan daerah yang harus disetorkan pada kas negara atau daerah. Sifat khususnya adalah terletak pada hubungan prestasi dan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjuk. Dalam retribusi pada umumnya bersifat paksaan, tergantung apakah ia mempergunakan jasa dari daerah atau tidak. Bila ia mempergunakan maka harus membayar retribusi berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan retribusi adalah suatu pembiayaan dari rakyat kepada pemerintah, dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut

(Suparmoko, 1990: 94). Selanjutnya dalam UU No. 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengertian retribusi secara umum adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah karena seseorang atau badan hukum menggunakan jasa atau barang pemerintah yang langsung dapat ditunjuk (Soetrisno, PH, 1983: 139).

Retribusi adalah uraian kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk paksaan disini bersifat ekonomi karena siapa saja yang tidak mendapat jasa balik pemerintah dia tidak dikenakan iuran ini (S. Munawir, 1990 : 4).

Dari beberapa pengertian retribusi diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud jasa balik disini adalah apabila seseorang atau badan usaha dikenakan retribusi secara paksa maka ia memperoleh imbalan secara langsung yang telah disediakan dengan tempat dan keadaan, dengan harapan penarikan retribusi ini tidak memberatkan para wajib retribusi atau masyarakat.

Penerimaan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan diperlukan oleh masyarakat. Dilihat dari obyeknya retribusi daerah masih dapat dikembangkan melalui peningkatan jasa pelayanan, sepanjang jasa pelayanan yang diberikan tersebut benar-benar nyata,

tidak dibuat-buat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian retribusi tersebut tidak boleh dipungut terlampau tinggi dan tidak boleh memutasi keluar masuknya barang atau pengangkutan barang ke dalam dan keluar daerah bersangkutan.

Retribusi daerah merupakan pendapatan yang tidak kecil dalam mengisi keuangan daerah. Sedangkan bagi masyarakat, hal ini merupakan beban karenanya peraturan dan retribusi daerah perlu pengesahan lebih dulu oleh penguasa dan sesuai dengan peraturan yang ditentukan dalam Undang-undang. Adapun ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi dipungut oleh daerah.
2. Dalam pungutan retribusi daerah terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang diberikan atau disediakan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 bahwa objek pungutan retribusi daerah terdiri dari Peraturan Pemerintah RI 1997 Pasal I:

1. **Jasa Umum**

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan atau pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun jenis retribusi umum yang ditetapkan oleh pemerintah, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a) Bersifat bukan pajak dan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa yang diberikan memberi manfaat khusus bagi orang pribadi/badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f) Dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3. Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan

atas kegiatan pemanfaatan atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjadi kelestarian lingkungan.

4.4.2 Tujuan dan Manfaat Retribusi Daerah

Retribusi sebagai salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah dimaksudkan dapat memasukkan dana ke kas daerah sebanyak-banyaknya guna membiayai pengeluaran pemerintah. Sehingga kestabilan ekonomi yang mantap dapat tercapai karena laju pertumbuhan ekonomi yang layak dapat dipertahankan (M. Suparmoko, 1990: 260).

Sebagai instrumen kebijaksanaan fiskal, retribusi daerah mempunyai beberapa kemampuan strategis yang mencerminkan manfaat dari retribusi itu sendiri. Manfaat-manfaat tersebut yaitu:

1. Retribusi dapat meningkatkan kemampuan dalam pembiayaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Agar retribusi dapat berfungsi secara efisien dan efektif maka tidak harus memperhitungkan secara ekonomi dan fisik saja, tetapi harus ada kesadaran dan peran aktif yang cukup tinggi dari masing-masing atau masyarakat sebagai wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya untuk memenuhi pembayaran retribusi atas jasa yang telah digunakan.

4.4.3 Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat, karena itu menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan peran serta dalam pembiayaan pembangunan.

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan menitik beratkan pada tingkat kabupaten. Penarikan retribusi dilakukan dalam kaitannya masyarakat sebagai warga negara dan pemerintah bersifat hukum publik.

Retribusi Daerah didasarkan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Pasal 24 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa (Peraturan Perundang-undangan, 1997: Pasal 24):

1. Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah
2. Peraturan Daerah tentang retribusi tidak dapat berlaku surut.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 berlaku surut dengan retribusi adalah retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Adapun jenis-jenis jasa umum adalah (Peraturan Pemerintah RI, 1997:

Pasal 2):

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Kebersihan
3. Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
4. Retribusi Pemakaman dan Penguburan Mayat
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pasar
7. Retribusi Air Bersih
8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
9. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
11. Retribusi Penggantian Kabel Perikanan.

Sedangkan jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah (Peraturan Pemerintah RI, 1997: Pasal 3):

1. Retribusi Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pertokoan/Grosir
3. Retribusi Terminal
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir
5. Retribusi Tempat Penitipan Anak
6. Retribusi Penginapan/Villa
7. Retribusi Penyedotan Kakus
8. Retribusi Rumah Potong Hewan

9. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal
10. Retribusi dan Olah Raga
11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
12. Retribusi Produksi Usaha Daerah.

Sedang jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah (Peraturan Pemerintah RI, 1997: Pasal 4):

1. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4. Retribusi Izin Tempat Bangunan
5. Retribusi Trayek.

4.5 Pengertian Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output*. Efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi untuk mencapai output tertentu. Menurut Joko Widodo (2001: 209), indikator input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Indikator output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik.

Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain:

1. Efisiensi pada sektor usaha swasta (*private sector efficiency*), dijelaskan dengan konsep *input output* yaitu rasio *output* dan *input*;
2. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat (*public sector efficiency*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin;
3. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya (*input*) minimal diperoleh hasil (*output*) yang diinginkan.

Beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan meningkatkan *output* dengan *input* yang sama, atau dengan menaikkan *output* dengan proporsi yang besar dengan kenaikan *output* yang proporsional, atau juga dengan menurunkan *input* dengan proporsi yang besar dan menurunkan *output* secara proporsional.

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep efektivitas, yaitu rasio yang membandingkan antara *output* yang dihasilkan dengan *input* yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan dilakukan secara efisien apabila suatu target kinerja tertentu (*outcome*) dapat dicapai dengan menggunakan sumberdaya dan biaya serendah-rendahnya.

Pengertian efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat

keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas menurut Devas, dkk (1989: 279-280) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-sepatnya.

Efektivitas merupakan kaitan atau hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya. Efektivitas dalam pemerintahan daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan di dalam batas anggaran yang tersedia. Dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang telah direncanakan. Faktor penentu efisiensi dan efektivitas sebagai berikut.

1. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
2. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
3. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
4. Faktor dukungan kepada aparaturnya dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.

5. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

BAB V METODE PENELITIAN

5.1 Desain Penelitian

Dalam membahas suatu metode penelitian ada penjelasan tentang teknik-teknik pengumpulan data atau cara memperoleh data, cara menentukan sampel dengan menganalisis data. Tiap jenis penelitian akan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data yang serasi dengan jenis penelitian yang dipilih. Sedangkan teknik diartikan sebagai alat kerja yang merupakan kelengkapan cara memperoleh data atau informasi (Sugiono, 2004).

Metode penelitian merupakan cara yang ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan itu dilandasi metode keilmuan yaitu bergantung pada cara peneliti mengumpulkan fakta. Jika metode penelitian merupakan cara ilmiah, maka diharapkan data yang akan diperoleh adalah data yang objektif, valid dan reliabel.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian statistik dengan pendekatan deskriptif. Metode pendekatan deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel bebas, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiono, 2004).

Dalam hal ini penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten, dimana peneliti ingin mengetahui tentang efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten tahun 2000-2004.

5.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah dan retribusi daerah. Definisi operasional variabel penelitian tersebut adalah:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber-sumber pendapatan daerah yang dihitung dari pendapatan:

- Pajak Hotel dan Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber-sumber pendapatan daerah yang dihitung dari pendapatan:

- Retribusi Pelayanan Persampahan
- Retribusi Parkir ditepi jalan umum

5.3 Metode Analisis

Metode yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu obyek dan penelitian ini tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu. Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan

daerah Kabupaten Klaten dari tahun anggaran 2000 sampai tahun anggaran 2004 serta untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun metode analisis yang digunakan adalah:

1. Rasio Efektivitas

Efektifitas adalah ukuran keberhasilan tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektifitas merupakan hubungan antara realisasi hasil pungutan atau penerimaan terhadap potensi hasil pajak, dalam hal ini bagaimana keefektifan penerimaan pajak daerah Kabupaten Klaten.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil (Widodo, 2002 dalam Halim, 2002). Rumus yang digunakan adalah:

$$E_{\text{Pajak}} = \frac{\text{RealisasiPenerimaanPajak}}{\text{TargetPenerimaanPajak}}$$

$$E_{\text{Retribusi}} = \frac{\text{RealisasiPenerimaanRetribusi}}{\text{TargetPenerimaanRetribusi}}$$

Kriteria pengujian : apabila $E > 1$ maka efektif, apabila $E < 1$ maka tidak efektif.

2. Rasio Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output/keluaran dan input/masukan sekunder. Sedangkan analisis yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan pengeluaran rutin menggunakan

ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran rutin dengan pendapatan/penerimaan daerah dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase. (Widodo, 2002 dalam Halim, 2002). Rumus untuk menghitung rasio efisiensi yaitu:

$$E_{\text{Pajak}} = \frac{\text{Pengeluaran Rutin Biaya yang Dikeluarkan Untuk Memungut Pajak}}{\text{Total Pendapatan Pajak}} \times 100\%$$

$$E_{\text{Retribusi}} = \frac{\text{Pengeluaran Rutin Biaya yang Dikeluarkan Untuk Memungut Retribusi}}{\text{Total Pendapatan Retribusi}} \times 100\%$$

Dalam metode Nick Devas (1998), pengelolaan keuangan daerah dinilai efisien jika presentase yang dicapai berkisar antara 5% - 25 %, sehingga bila prosentase yang di capai dibawah 5 % maka dapat dikatakan sangat efisien. Semakin rendah prosentase biaya pungutan dari realisasi penerimaan maka akan semakin efisien pemungutan yang dilakukan.

3. Indeks Agregatif

Untuk mengukur tingkat pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah digunakan analisis indeks agregatif. Indeks ini digunakan untuk mengukur segala perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun dibandingkan dengan tahun dasar yang dipergunakan sebagai pedoman perhitungan.

Adapun rumus yang digunakan : (Djarwanto, 1996)

$$IA = \frac{\sum P_n}{\sum P_o} \times 100\%$$

Dimana :

- IA : Indeks Agregatif
 P_n : Pajak atau Retribusi Daerah tahun tertentu
 P_o : Pajak atau Retribusi Daerah tahun dasar

Kriteria pengujian, jika:

- IA > 100, berarti variabel pada tahun tertentu mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun dasar.
- IA = 100, berarti variabel pada tahun tertentu adalah tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun dasar.
- IA < 100, berarti variabel pada tahun tertentu mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun dasar.

5.4 Sampel Penelitian

Data penelitian ini dikumpulkan dengan melalui:

1. Studi pustaka

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari beberapa konsep teoritis secara literatur yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Data Statistik

Bahan dan materi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi yang diterbitkan oleh:

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
- b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)

5.5 Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari literatur dan sumber bacaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang hendak diteliti misalnya dalam bentuk tabel-tabel (Muchamad, 1998).

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten yang berupa laporan target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun anggaran 2000-2004.

BAB VI

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan utama penelitian, bab ini akan membahas efisiensi dan efektivitas pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klaten pada periode tahun 2000 – 2004. Pada awal penulisan, telah dikemukakan bahwa penelitian ini hanya meneliti pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, retribusi kebersihan serta retribusi parkir yang dikelola langsung oleh Dipenda Kabupaten Klaten. Selain itu, akan ditunjukkan pula tingkat pertumbuhan kinerja pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klaten pada periode yang sama serta potensi pajak dan retribusi yang paling dominan mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten.

6.1 Analisis Tingkat Pertumbuhan Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 – 2004

Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan kinerja pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klaten digunakan indeks agregatif. Indeks ini digunakan untuk mengukur segala perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun dibandingkan dengan tahun dasar yang dipergunakan sebagai pedoman perhitungan.

6.1.1 Tingkat Pertumbuhan Kinerja Pajak Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 – 2004

Tingkat pertumbuhan pendapatan pajak daerah yaitu pajak hiburan, pajak hotel dan restoran serta pajak reklame di Kabupaten Klaten periode tahun 2000 - 2004 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini.

TABEL 6.1
PERTUMBUHAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2000 – 2004

Tahun	Pajak (Rp)			Jumlah (Rp)	Indeks Tahun Dasar 2000
	Hiburan	Hotel & Restoran	Reklame		
2000	44.465.508	52.374.259	81.563.461	178.403.228	100,00%
2001	57.410.950	73.421.866	114.754.415	245.587.231	137,66%
2002	59.461.150	82.497.317	193.965.541	335.924.008	188,29%
2003	62.486.250	98.663.910	260.686.372	421.836.532	236,45%
2004	47.060.500	81.350.100	545.775.995	674.186.595	377,90%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten (diolah)

Dari Tabel 6.1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi pajak daerah di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dalam perkembangannya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 terjadi kenaikan realisasi pendapatan sehingga indeks atau perkembangan persentase kenaikan pajak daerah yang diperoleh melebihi persentase kenaikan tahun dasar. Bahkan pada tahun 2004 peningkatan realisasi pajak daerah tersebut mencapai 277,90%.

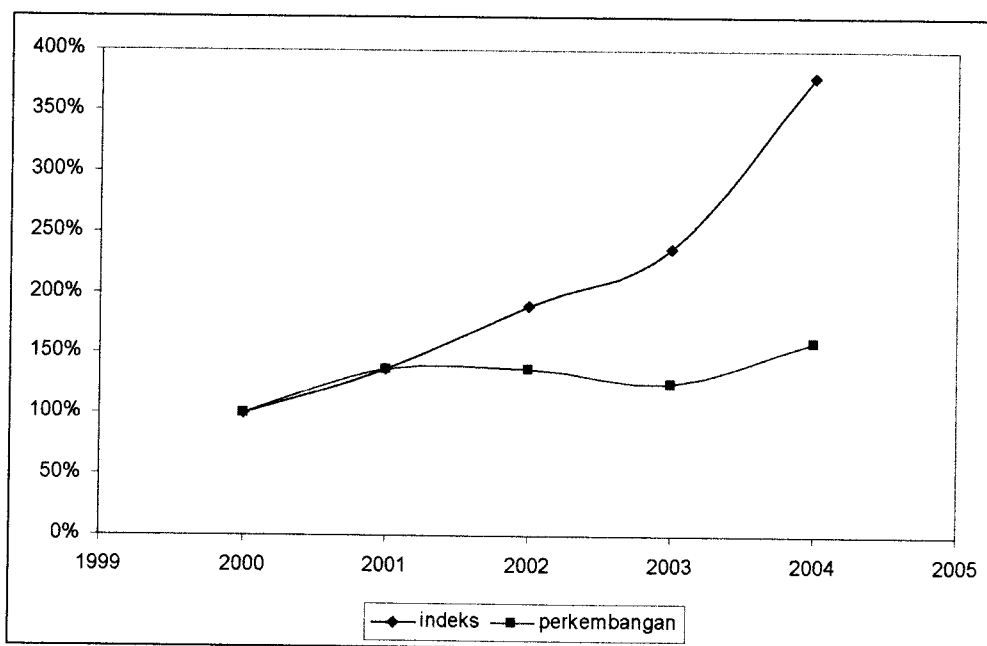
Pada tahun 2001, peningkatan realisasi pajak daerah dapat dilihat dengan membandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2000, dimana realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2001 mengalami kenaikan sebesar Rp.67.184.003 atau 37,66% dari realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun

2000. Indeks yang dicapai sebesar 137,66% dari realisasi tahun dasar yaitu tahun 2000. Peningkatan pendapatan pajak daerah yang paling tinggi ada pada pajak reklame yaitu dari Rp.81.563.461 pada tahun 2000 menjadi Rp.114.754.415 pada tahun 2001.

Tahun 2002 peningkatan realisasi pajak daerah sebesar Rp.157.520.780 atau 88,29% dari realisasi tahun dasar yaitu tahun 2000 dan indeks yang dicapai sebesar 188,29%. Sedangkan selisih dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2001 sebesar Rp.90.336.777 atau 36,78% dari realisasi tahun sebelumnya. Dari data yang ditunjukkan pada tahun 2002 ini maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak daerah pada tahun 2002 mengalami kenaikan yang cukup pesat yaitu sebesar Rp.90.336.777 dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang cukup pesat terjadi pada pajak reklame yaitu pada tahun 2001 sebesar Rp.114.754.415 menjadi Rp.193.965.541 pada tahun 2002.

Pada tahun 2003, peningkatan realisasi pajak daerah sebesar Rp.243.433.304 atau 136,45% dari realisasi tahun dasar yaitu tahun 2000 dan indeks yang dicapai sebesar 236,45%. Sedangkan selisih dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2002 sebesar Rp.85.912.524 atau 25,57% dari realisasi tahun sebelumnya. Dari data yang ditunjukkan pada tahun 2003 ini maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak daerah pada tahun 2003 mengalami kenaikan yang cukup pesat yaitu sebesar Rp.85.912.524 dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang cukup pesat terjadi pada pajak reklame yaitu pada tahun 2002 sebesar Rp.193.965.541 menjadi Rp.260.686.372 pada tahun 2003.

Pada tahun 2004, peningkatan realisasi pajak daerah sebesar Rp.495.783.367 atau 277,90% dari realisasi tahun dasar yaitu tahun 2000 dan indeks yang dicapai sebesar 377,90%. Sedangkan selisih dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2003 sebesar Rp.252.350.063 atau 59,82% dari realisasi tahun sebelumnya. Dari data yang ditunjukkan pada tahun 2004 ini maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak daerah pada tahun 2004 mengalami kenaikan yang cukup pesat yaitu sebesar Rp.252.350.063 dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang cukup pesat terjadi pada pajak reklame yaitu pada tahun 2003 sebesar Rp.260.686.372 menjadi Rp.545.775.995 pada tahun 2004.



GAMBAR 6.1
GRAFIK PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH KABUPATEN KLATEN
PERIODE TAHUN 2000-2004

6.1.2 Tingkat Pertumbuhan Kinerja Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 – 2004

Tingkat pertumbuhan pendapatan retribusi daerah yaitu retribusi kebersihan dan retribusi parkir di Kabupaten Klaten periode tahun 2000 - 2004 dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut ini.

TABEL 6.2
PERTUMBUHAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2000 – 2004

Tahun	Retribusi (Rp)		Jumlah (Rp)	Indeks Tahun Dasar 2000
	Kebersihan	Parkir		
2000	35.272.035	160.124.200	195.396.235	100,00%
2001	44.207.425	252.331.000	296.538.425	151,76%
2002	174.892.590	280.240.700	455.133.290	232,93%
2003	202.889.610	250.968.000	453.857.610	232,28%
2004	215.338.100	259.298.000	474.636.100	242,91%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten (diolah)

Dari Tabel 6.2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi retribusi daerah di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam perkembangannya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 terjadi kenaikan realisasi pendapatan sehingga indeks atau perkembangan persentase kenaikan retribusi daerah yang diperoleh melebihi persentase kenaikan tahun dasar. Bahkan pada tahun 2004 peningkatan realisasi retribusi daerah tersebut mencapai 142,91%.

Pada tahun 2001, peningkatan realisasi retribusi daerah dapat dilihat dengan membandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2000, dimana realisasi pendapatan retribusi daerah pada tahun 2001 mengalami kenaikan sebesar Rp.101.142.190 atau 51,76% dari realisasi pendapatan retribusi daerah pada tahun

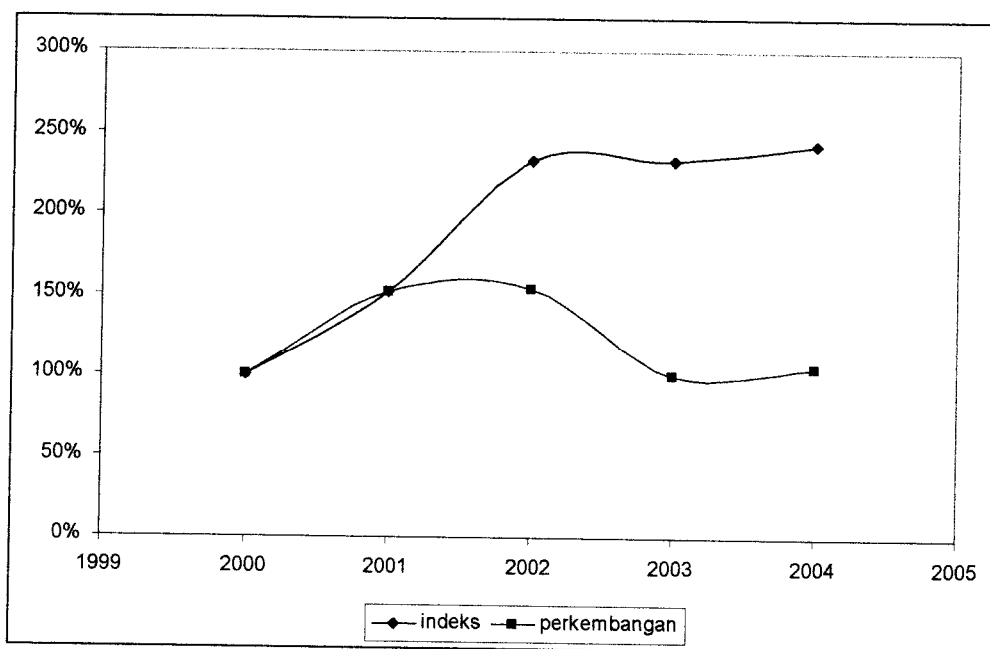
2000. Indeks yang dicapai sebesar 151,76% dari realisasi tahun dasar yaitu tahun 2000. Peningkatan pendapatan retribusi daerah yang paling tinggi ada pada retribusi parkir yaitu dari Rp.160.124.200 pada tahun 2000 menjadi Rp.252.331.000 pada tahun 2001.

Tahun 2002 peningkatan realisasi retribusi daerah sebesar Rp.259.737.055 atau 132,93% dari realisasi tahun dasar yaitu tahun 2000 dan indeks yang dicapai sebesar 232,93%. Sedangkan selisih dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2001 sebesar Rp.158.594.865 atau 53,48% dari realisasi tahun sebelumnya. Dari data yang ditunjukkan pada tahun 2002 ini maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak daerah pada tahun 2002 mengalami kenaikan yang cukup pesat yaitu sebesar Rp.158.594.865 dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang cukup pesat terjadi pada retribusi kebersihan yaitu pada tahun 2001 sebesar Rp.44.207.425 menjadi Rp.174.892.590 pada tahun 2002.

Pada tahun 2003, peningkatan realisasi retribusi daerah sebesar Rp.258.461.375 atau 132,28% dari realisasi tahun dasar yaitu tahun 2000 dan indeks yang dicapai sebesar 232,28%. Sedangkan selisih dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2002 sebesar Rp.1.275.680 atau menurun 0,28% dari realisasi tahun sebelumnya. Dari data yang ditunjukkan pada tahun 2003 ini maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak daerah pada tahun 2003 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.1.275.680 dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2004, peningkatan realisasi retribusi daerah sebesar Rp.279.239.865 atau 142,91% dari realisasi tahun dasar yaitu tahun 2000 dan indeks yang dicapai sebesar 242,91%. Sedangkan selisih dari tahun sebelumnya

yaitu tahun 2003 sebesar Rp.20.778.790 atau 4,58% dari realisasi tahun sebelumnya. Dari data yang ditunjukkan pada tahun 2004 ini maka dapat disimpulkan bahwa realisasi retribusi daerah pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar Rp.20.778.790 dari tahun sebelumnya.



GAMBAR 6.2
GRAFIK PERTUMBUHAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KLATEN
PERIODE 2000-2004

6.2 Analisis Efisiensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 – 2004

Efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi untuk mencapai output tertentu. Efisiensi diukur dengan

rasio antara output dengan input. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya (*input*) minimal diperoleh hasil (*output*) yang diinginkan. Semakin rendah prosentase biaya pungutan dari realisasi penerimaan maka akan semakin efisien pemungutan yang dilakukan.

Biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan pajak dan retribusi daerah dapat dikatakan efisien jika presentase yang dicapai berkisar antara 5% - 25 %, sehingga bila prosentase yang di capai atau biaya pungutannya dibawah 5 % dari realisasi penerimaan maka dapat dikatakan sangat efisien (Nick Devas, 1998). Biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan pajak dan retribusi daerah yang diteliti dapat dilihat pada tabel 6.3.

Berdasarkan Tabel 6.3 dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini Dipenda) untuk mengumpulkan pajak dan retribusi daerah semakin meningkat. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten periode tahun 2000 – 2004 sebesar Rp.60.746.440,51. Adapun rata-rata biaya paling tinggi yang dikeluarkan sebesar Rp.22.487.350,41 yang digunakan untuk mengumpulkan pajak reklame.

TABEL 6.3
BIAYA PUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KLATEN PERIODE TAHUN 2000 – 2004

Tahun	Pajak			Retribusi		Jumlah
	Hiburan	Hotel & Restoran	Reklame	Kebersihan	Parkir	
2000	2.770.201	3.262.916	5.081.404	2.197.448	9.975.738	23.287.707
2001	3.909.686	5.000.029	8.962.320	3.452.600	19.707.051	41.031.686
2002	4.067.143	5.659.316	17.146.554	13.711.579	22.391.232	62.975.823
2003	4.580.242	8.218.704	24.322.039	16.494.925	19.199.052	72.814.962
2004	3.025.990	5.474.862	56.924.436	18.153.002	20.043.735	103.622.025
Rata-rata	3.670.652,36	5.523.165,36	22.487.350,41	10.801.910,77	18.263.361,62	60.746.440,51

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Dalam Angka

Biaya untuk mengumpulkan pajak dan retribusi daerah dinilai efisien jika rasio efisiensinya berkisar antara 5% sampai 25%. Adapun rasio efisiensi biaya untuk mengumpulkan pajak dan retribusi daerah periode tahun 2000 – 2004 di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 6.4 di bawah ini.

TABEL 6.4
TINGKAT EFISIENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KLATEN PERIODE TAHUN 2000 – 2004

Tahun	Biaya Pungutan	Realisasi	Rasio (%)	Kategori
	Pajak + Retribusi	Pajak + Retribusi		
2000	23.287.707	373.799.463	6,23	Efisien
2001	41.031.686	542.125.656	7,57	Efisien
2002	62.975.823	791.057.298	7,96	Efisien
2003	72.814.962	875.694.142	8,32	Efisien
2004	103.622.025	1.148.822.695	9,02	Efisien
Rata-rata	60.746.441	746.299.851	7,82	Efisien

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten (diolah)

Dari Tabel 6.4 di atas, dapat terlihat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten tahun 2000

sebesar Rp.23.287.707. Nilai ini dapat dikategorikan efisien dengan rasio efisiensi sebesar 6,23%. Pada tahun 2001, rasio efisiensi biaya pungutan meningkat menjadi 7,57% dengan kategori efisien dan biaya nominalnya sebesar Rp.41.031.686. Demikian pula pada tahun 2002, biaya pungutan juga dapat dikategorikan efisien dengan rasio efisiensi sebesar 7,96%. Biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2002 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2001 menjadi sebesar Rp.62.975.823. Sedangkan pada tahun 2003 biaya pungutan untuk mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp.72.814.962 dan dapat dikategorikan efisien dengan rasio efisiensi sebesar 8,32%. Biaya paling tinggi yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah periode tahun 2000 – 2004 terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp.103.622.025. Tetapi biaya tersebut masih dalam kategori efisien dengan rasio efisiensi sebesar 9,02%.

Dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi biaya pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun ke tahun semakin meningkat yang berarti bahwa biaya yang digunakan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun ke tahun semakin besar. Meskipun demikian, biaya yang dikeluarkan tersebut masih dapat dikategorikan efisien karena pajak daerah dan retribusi daerah yang terkumpul juga semakin meningkat. Meningkatnya biaya pungutan tersebut dikarenakan dari tahun ke tahun, pos pajak dan retribusi yang dimiliki Kabupaten Klaten semakin banyak. Misalnya dari pajak yaitu jumlah hotel dan restoran yang semakin meningkat, jumlah reklame yang semakin banyak, dan lain-lain sehingga

mengakibatkan biaya untuk memungut/mengumpulkan pajak dan retribusi daerah semakin meningkat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dipenda Kabupaten Klaten (diolah), dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat efisiensi biaya pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dikategorikan efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 7,82% (rasio efisiensi antara 5% - 25%). Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah periode tahun 2000 – 2004 sebesar Rp.60.746.441 dan rata-rata realisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat diterima dalam kurun waktu 5 tahun tersebut sebesar Rp.746.299.851. Hal ini berarti bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten periode tahun 2000 – 2004 jauh lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Dipenda Kabupaten Klaten.

Temuan hasil penelitian ini sama dengan temuan Iwan yang meneliti tentang peranan pajak hotel dan restoran. Akan tetapi, daerah penelitian tersebut berbeda dengan daerah penelitian ini yaitu di Kabupaten Sukoharjo. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 1994/1995-2004 dapat dikatakan efisien dengan rasio efisiensi 9,34%.

6.3 Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 – 2004

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan hubungan antara realisasi hasil pungutan atau

penerimaan terhadap target penerimaan pajak, dalam hal ini bagaimana keefektifan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Klaten pada kurun waktu 2000 – 2004.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dibandingkan dengan target yang sebelumnya telah ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikatakan efektif jika rasio efektivitasnya lebih besar dari 1. Sebaliknya jika rasio efektivitasnya lebih kecil dari 1 maka realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dikatakan tidak efektif.

6.3.1 Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 – 2004

Tingkat efektivitas pajak daerah di Kabupaten Klaten tahun 2000 – 2004 dapat dilihat pada Tabel 6.5 di bawah ini.

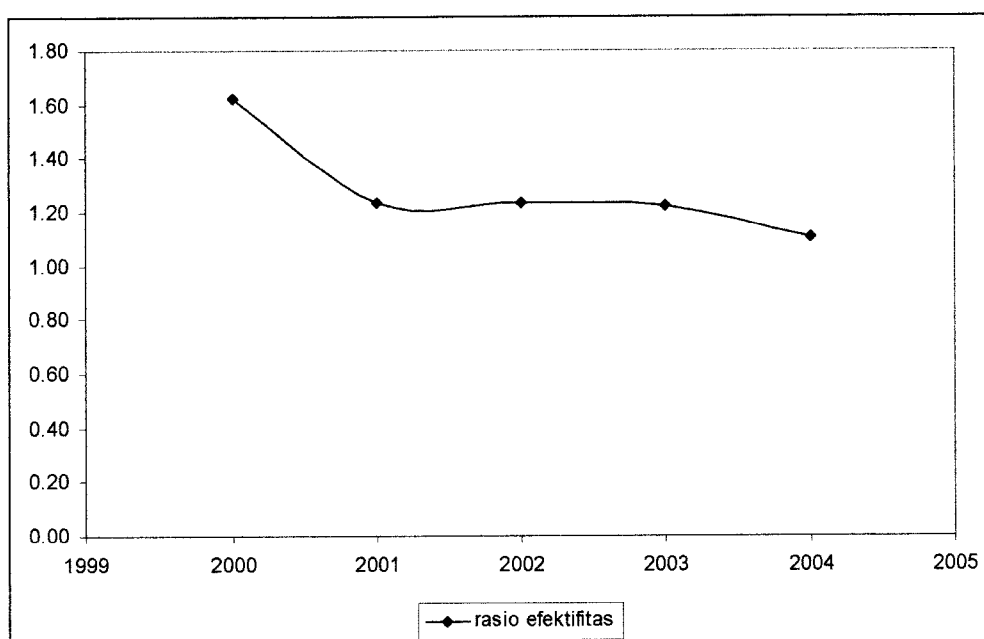
TABEL 6.5
TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH KABUPATEN KLATEN
PERIODE TAHUN 2000 – 2004

Tahun	Realisasi Pajak	Target Pajak	Rasio	Kategori
2000	178.403.228	110.000.000	1,62	Efektif
2001	245.587.231	198.585.000	1,24	Efektif
2002	335.924.008	271.500.000	1,24	Efektif
2003	421.836.532	345.000.000	1,22	Efektif
2004	674.186.595	610.000.000	1,11	Efektif
Rata-rata	371.187.519	307.017.000	1,21	Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten (diolah)

Berdasarkan Tabel 6.5 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Klaten tahun 2000 – 2004 dapat dikategorikan efektif

dengan rasio efektivitasnya lebih besar dari 1. Meskipun realisasi penerimaan pajak daerahnya mengalami peningkatan yang cukup pesat, akan tetapi rasio efektivitas realisasi pajak daerah dari tahun ke tahun di Kabupaten Klaten mengalami penurunan. Menurunnya rasio efektivitas tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pajak daerah.



GAMBAR 6.3
GRAFIK TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2000-2004

Pada tahun 2000, rasio efektivitas realisasi pajak daerah sebesar 1,62. Dapat dikatakan bahwa realisasi pajak daerah pada tahun tersebut di Kabupaten

Klaten efektif. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pajak daerah yang lebih besar dari target realisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

Demikian juga pada tahun 2001, bahwa realisasi pajak daerah pada tahun ini dapat dikategorikan efektif dengan rasio efektivitas sebesar 1,24. Meskipun rasio efektivitasnya mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya, akan tetapi realisasi pajak daerah masih lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.245.587.231 dan besarnya target yang ditetapkan sebesar Rp.198.585.000.

Pada tahun 2002, realisasi pajak daerah juga dapat dikategorikan efektif dengan rasio sebesar 1,24. Meskipun rasio efektivitasnya sama dengan rasio pada tahun 2001, akan tetapi realisasi penerimaannya mengalami peningkatan menjadi Rp.335.924.008. Hal yang sama terjadi pada tahun 2003 dan tahun 2004 bahwa realisasi penerimaan pajak daerah dapat dikategorikan efektif dengan rasio efektivitasnya masing-masing sebesar 1,22 dan 1,11.

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa dari tahun 2000 sampai tahun 2004, realisasi penerimaan pajak daerah dapat dikatakan efektif jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Rata-rata rasio efektivitas dari tahun 2000 sampai 2004 juga menunjukkan realisasi penerimaan pajak daerah efektif dengan nilai rata-rata rasio sebesar 1,21. Hal ini berarti realisasi penerimaan pajak daerah yang dapat diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten melebihi target realisasi yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Klaten tahun 2000 – 2004 tersebut dapat dikatakan efektif.

Target penerimaan pajak daerah tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Target yang ditetapkan pemerintah daerah tersebut didasarkan pada pos pajak daerah pada tahun sebelumnya dan dengan perhitungan bahwa pos pajak daerah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sehingga besarnya nilai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut dari tahun ke tahun semakin meningkat pula.

6.3.2 Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 – 2004

Tingkat efektivitas retribusi daerah di Kabupaten Klaten tahun 2000 – 2004 dapat dilihat pada Tabel 6.6 di bawah ini.

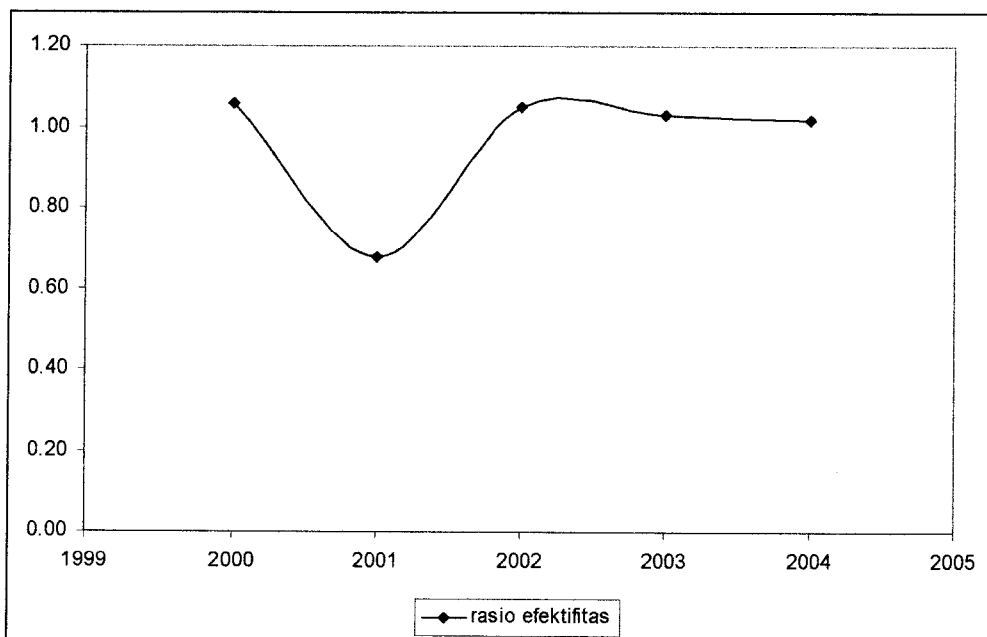
TABEL 6.6
TINGKAT EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KLATEN
PERIODE TAHUN 2000 – 2004

Tahun	Realisasi Retribusi	Target Retribusi	Rasio	Kategori
2000	195.396.235	185.000.000	1,06	Efektif
2001	296.538.425	438.000.000	0,68	Tidak Efektif
2002	455.133.290	434.000.000	1,05	Efektif
2003	453.857.610	440.932.000	1,03	Efektif
2004	474.636.100	466.306.000	1,02	Efektif
Rata-rata	375.112.332	392.847.600	0,95	Kurang Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten (diolah)

Berdasarkan Tabel 6.6 di atas, dapat dilihat bahwa secara umum realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun pada periode 2000 – 2004 cenderung mengalami penurunan (lihat gambar 4.4). Bahkan pada tahun 2001, realisasi penerimaan retribusi daerahnya dapat dikatakan tidak efektif.

Pada tahun 2000, rasio efektivitas realisasi retribusi daerah sebesar 1,06. Dapat dikatakan bahwa realisasi retribusi daerah pada tahun tersebut di Kabupaten Klaten efektif. Hal ini dapat dilihat dari realisasi retribusi daerah sebesar Rp.195.396.235 yang lebih besar dari target realisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yaitu sebesar Rp.185.000.000.



GAMBAR 6.4
GRAFIK TINGKAT EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2000-2004

Akan tetapi, pada tahun 2001 realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun ini dapat dikategorikan tidak efektif dengan rasio efektivitas sebesar 0,68. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan retribusi daerahnya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu lebih kecil dari targetnya. Realisasi penerimaan

retribusi daerah pada tahun 2001 tersebut sebesar Rp.296.538.425. Sedangkan target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan pada tahun tersebut jauh lebih besar yaitu Rp.438.000.000. Tidak efektifnya realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2001 tersebut dikarenakan tidak sesuaiya realisasi penerimaan pada retribusi parkir dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2001 sebesar Rp.252.331.000, sedangkan target penerimaan yang ditetapkan pemerintah daerah pada tahun tersebut sebesar Rp.397.000.000.

Pada tahun 2002, terjadi peningkatan rasio efektivitas dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,05. Besarnya rasio tersebut dapat dikategorikan efektif. Realisasi penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan yang pesat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp.455.133.290. Padahal besarnya target yang ditetapkan pemerintah daerah mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.434.000.000. Penurunan besar target penerimaan retribusi daerah tersebut dapat diakibatkan karena tidak efektifnya realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada tahun 2003 dan tahun 2004 bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah dapat dikategorikan efektif dengan rasio efektivitasnya masing-masing sebesar 1,03 dan 1,02.

Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa rata-rata rasio efektivitas dari tahun 2000 sampai 2004 menunjukkan realisasi penerimaan retribusi daerah kurang efektif dengan nilai rata-rata rasio sebesar 0,95. Hal ini berarti realisasi penerimaan retribusi daerah yang dapat diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten belum dapat melebihi target realisasi yang telah ditetapkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Klaten tahun 2000 – 2004 tersebut dapat dikatakan kurang efektif.

Berdasarkan data yang telah dianalisis tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sudah mampu memungut pajak daerah secara maksimal yaitu melebihi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dapat dikatakan belum mampu memungut retribusi daerah secara maksimal. Target penerimaan retribusi daerah tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Target yang ditetapkan pemerintah daerah tersebut cenderung didasarkan pada pos retribusi daerah pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, penentuan target tersebut tidak semata-mata hal tersebut, akan tetapi juga didasarkan pada potensi pos retribusi daerah itu sendiri. Misalnya pada tahun 2002, target pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan pemerintah daerah lebih kecil dibandingkan pada tahun 2001. Hal ini dikarenakan data potensi retribusi daerah yang diperoleh oleh pemerintah mengalami penurunan sehingga target yang ditetapkan pun juga mengalami penurunan.

6.3.3 Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 – 2004

Tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten tahun 2000 – 2004 dapat dilihat pada Tabel 6.7 berikut ini.

TABEL 6.7
TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KLATEN PERIODE TAHUN 2000 – 2004

Tahun	Realisasi	Target	Rasio	Kategori
	Pajak + Retribusi	Pajak + Retribusi		
2000	373.799.463	295.000.000	1,27	Efektif
2001	542.125.656	636.585.000	0,85	Tidak Efektif
2002	791.057.298	705.500.000	1,12	Efektif
2003	875.694.142	785.932.000	1,11	Efektif
2004	1.148.822.695	1.076.306.000	1,07	Efektif
Rata-rata	746.299.851	699.864.600	1,08	Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten (diolah)

Rasio efektivitas realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah, dalam hal ini Dipenda Kabupaten Klaten. Dari tahun ke tahun, kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah semakin menurun. Meskipun secara umum, realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh Dipenda Kabupaten Klaten periode tahun 2000 – 2004 dapat dikategorikan efektif dengan rasio efektivitas sebesar 1,08.

Pada kurun waktu tersebut khususnya tahun 2001, realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh Dipenda Kabupaten Klaten masuk dalam kategori tidak efektif karena rasio efektivitasnya kurang dari 1 yaitu sebesar 0,85. Ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun tersebut sebesar Rp.542.125.656, sedangkan besarnya target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan sebesar Rp.636.585.000. Hal ini dapat dikarenakan, masih adanya para wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sampai dengan

akhir tahun anggaran yang menyebabkan realisasi penerimaan retribusi daerah tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

6.4 Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 – 2004

Untuk mengetahui jenis pajak dan retribusi apakah yang memberikan potensi terbesar di Kabupaten Klaten dari tahun 2000 sampai tahun 2004, dapat dilihat dari nilai nominal realisasi penerimaan masing-masing pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klaten itu sendiri. Perbandingan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 6.8
REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN PERIODE TAHUN 2000 – 2004

Jenis Pajak	Realisasi (Rp)	Persentase
Pajak Hiburan	54.176.872	7,26%
Pajak Hotel&Restoran	77.661.490	10,41%
Pajak Reklame	239.349.157	32,07%
Retribusi Kebersihan	134.519.952	18,02%
Retribusi Parkir	240.592.380	32,24%
Jumlah	746.299.851	100,00%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten (diolah)

Berdasarkan Tabel 6.8 dapat ditunjukkan bahwa jenis pajak daerah yang memberikan potensi terbesar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Klaten pada periode tahun 2000 – 2004 adalah pajak reklame. Hal ini dapat dilihat dari nilai nominal realisasi penerimaannya yang paling besar dibandingkan dengan jenis pajak lainnya yaitu sebesar Rp.239.349.157 (32,07%). Sedangkan jenis retribusi

daerah yang memberikan potensi terbesar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Klaten pada periode tahun 2000 – 2004 adalah retribusi parkir yaitu sebesar Rp.240.592.380 (32,24%).

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Klaten periode tahun 2000 – 2004 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat.

Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2004 yang mengalami peningkatan sampai 277,90% dibandingkan tahun 2003. Demikian pula dengan realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2004 mengalami peningkatan sampai 142,91% dibandingkan tahun 2003.
2. Biaya yang digunakan untuk mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2000 – 2004 dapat dikategorikan efisien.

Hal ini terlihat dari rasio efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2000 – 2004 tersebut sebesar 7,82% (berkisar antara 5% - 25%) yang berarti bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten tahun 2000 – 2004 jauh lebih kecil dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Dipenda Kabupaten Klaten.
3. Secara umum, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Klaten periode tahun 2000 - 2004 dapat dikategorikan efektif dengan rasio efektifitas sebesar 1,08 (> 1).

4. Jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Klaten pada periode tahun 2000 – 2004 adalah pajak reklame (32,07%).
5. Jenis retribusi daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Klaten pada periode tahun 2000 – 2004 adalah retribusi parkir (32,24%).

7.2 Saran

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa realisasi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten pada periode tahun 2000 – 2004 dinilai efektif. Meskipun pada tahun 2001, realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dinilai tidak efektif. Hal ini dapat dikarenakan masih adanya para wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sampai dengan akhir tahun anggaran yang menyebabkan realisasi penerimaan retribusi daerah tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini Dipenda Kabupaten Klaten sebaiknya melakukan upaya – upaya perbaikan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah agar penerimaan pendapatan pajak daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dapat meningkat sesuai dengan target atau potensi yang dimiliki Kabupaten Klaten. Upaya – upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- secara intensif, *continue* dan terpadu memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang pajak kepada masyarakat, agar bisa meyakinkan

masyarakat bahwa pajak yang di bayarkan kepada pemerintah tidak sia-sia dan kembali ke mereka dalam bentuk sarana dan prasarana pelayanan masyarakat.

- pelayanan kepada para Wajib Pajak baik di kantor pajak maupun di lapangan perlu ditingkatkan lagi sehingga Wajib Pajak merasa puas dan nyaman terhadap pelayanan dalam membayar pajak.
- mengadakan pembinaan dan pelatihan secara berkala kepada petugas pendataan, petugas penagihan dan koordinator wilayah.

Daftar Pustaka

- Biro Pusat Statistik, Klaten Dalam Angka, Berbagai Edisi, BPS, Klaten
- Cahyono, Y.A. (2003), *Peranan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 1993/1994-1999/2000* (Tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Devas, N., dkk (1998), *Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia*, Edisi Terjemahan, UI Press, Jakarta
- Djarwanto, P. S., (1996), *Statistik Induktif*, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- FE UII (2005), *Pedoman Penulisan Skripsi* (Tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Iwan, *Peranan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sukoharjo* (Tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Kristiawan, H. (2001), *Peranan Pajak Penerangan Jalan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Asli Daerah di Kabupaten Bantul* (Tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Mardiasmo (2002), *Perpajakan*. Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta
- Munawir, S. (1990), *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta
- Nazir, M., (1998), *Pengantar Ekonometrika*, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta
- Nurlaili, F., *Peranan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang* (Tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Sarmin, *Peranan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kodya Dati II Kendari* (Tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Sugiyono (2004), *Metodologi Penelitian Bisnis*, CV Alfabeta, Bandung
- Suparmoko, M., (2002), *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Andi, Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 18, 22 dan 34, Tahun 1999, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Lampiran I

Perhitungan Pertumbuhan Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Periode Tahun 2000 – 2004

Rumus:

$$IA = \frac{\sum P_n}{\sum P_o} \times 100\%$$

dimana:

IA : Indeks Agregatif

P_n : Realisasi pajak atau retribusi daerah tahun tertentu

P_o : Realisasi pajak atau retribusi daerah tahun dasar

Pertumbuhan Kinerja Pajak Daerah

Tahun 2001

$$IA = \frac{Rp.245.587.231}{Rp.178.403.228} \times 100\% = 137,66\%$$

Tahun 2002

$$IA = \frac{Rp.335.924.008}{Rp.178.403.228} \times 100\% = 188,29\%$$

Tahun 2003

$$IA = \frac{Rp.421.836.532}{Rp.178.403.228} \times 100\% = 236,45\%$$

Tahun 2004

$$IA = \frac{Rp.674.186.595}{Rp.178.403.228} \times 100\% = 377,90\%$$

Pertumbuhan Kinerja Retribusi Daerah

Tahun 2001

$$IA = \frac{Rp.296.538.425}{Rp.195.396.235} \times 100\% = 151,76\%$$

Tahun 2002

$$IA = \frac{Rp.455.133.290}{Rp.195.396.235} \times 100\% = 232,93\%$$

Tahun 2003

$$IA = \frac{Rp.453.857.610}{Rp.195.396.235} \times 100\% = 232,28\%$$

Tahun 2004

$$IA = \frac{Rp.474.636.100}{Rp.195.396.235} \times 100\% = 242,91\%$$

Lampiran II

Perhitungan Rasio Efisiensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Periode Tahun 2000 – 2004

Rumus:

$$E = \frac{\text{Pengeluaran Rutin Biayayang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tahun 2000

$$E = \frac{\text{Rp.23.287.707}}{\text{Rp.373.799.463}} \times 100\% = 6,23\%$$

Tahun 2001

$$E = \frac{\text{Rp.41.031.686}}{\text{Rp.542.125.656}} \times 100\% = 7,57\%$$

Tahun 2002

$$E = \frac{\text{Rp.62.975.823}}{\text{Rp.791.057.298}} \times 100\% = 7,96\%$$

Tahun 2003

$$E = \frac{\text{Rp.72.814.962}}{\text{Rp.875.694.142}} \times 100\% = 8,32\%$$

Tahun 2004

$$E = \frac{\text{Rp.103.622.025}}{\text{Rp.1.148.822.695}} \times 100\% = 9,02\%$$

Lampiran III

Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Periode Tahun 2000 – 2004

Rumus:

$$E = \frac{\text{RealisasiPenerimaanPajak}}{\text{TargetPenerimaanPajak yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Tahun 2000

$$E = \frac{\text{Rp.178.403.228}}{\text{Rp.110.000.000}} = 1,62$$

Tahun 2001

$$E = \frac{\text{Rp.245.587.231}}{\text{Rp.198.585.000}} = 1,24$$

Tahun 2002

$$E = \frac{\text{Rp.335.924.008}}{\text{Rp.271.500.000}} = 1,24$$

Tahun 2003

$$E = \frac{\text{Rp.421.836.532}}{\text{Rp.345.000.000}} = 1,22$$

Tahun 2004

$$E = \frac{\text{Rp.674.186.595}}{\text{Rp.610.000.000}} = 1,11$$

Rasio Efektivitas Retribusi Daerah

Tahun 2000

$$E = \frac{\text{Rp.195.396.235}}{\text{Rp.185.000.000}} = 1,06$$

Tahun 2001

$$E = \frac{\text{Rp.296.538.425}}{\text{Rp.438.000.000}} = 0,68$$

Tahun 2002

$$E = \frac{\text{Rp.455.133.290}}{\text{Rp.434.000.000}} = 1,05$$

Tahun 2003

$$E = \frac{\text{Rp.453.857.610}}{\text{Rp.440.932.000}} = 1,03$$

Tahun 2004

$$E = \frac{\text{Rp.474.636.100}}{\text{Rp.466.306.000}} = 1,02$$

Rasio Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah

Tahun 2000

$$E = \frac{\text{Rp.373.799.463}}{\text{Rp.295.000.000}} = 1,27$$

Tahun 2001

$$E = \frac{\text{Rp.542.125.656}}{\text{Rp.636.585.000}} = 0,85$$

Tahun 2002

$$E = \frac{\text{Rp.791.057.298}}{\text{Rp.705.500.000}} = 1,12$$

Tahun 2003

$$E = \frac{\text{Rp.875.694.142}}{\text{Rp.785.932.000}} = 1,11$$

Tahun 2004

$$E = \frac{\text{Rp.1.148.822.695}}{\text{Rp.1.076.306.000}} = 1,07$$

Lampiran IV**Perhitungan Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Klaten Periode Tahun 2000 – 2004****Pajak Hiburan**

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Rp.54.176.872}}{\text{Rp.746.299.851}} \times 100\% = 7,26\%$$

Pajak Hotel dan Restoran

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Rp.77.661.490}}{\text{Rp.746.299.851}} \times 100\% = 10,41\%$$

Pajak Reklame

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Rp.239.349.157}}{\text{Rp.746.299.851}} \times 100\% = 32,07\%$$

Retribusi Kebersihan

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Rp.134.519.952}}{\text{Rp.746.299.851}} \times 100\% = 18,02\%$$

Retribusi Parkir

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Rp.240.592.380}}{\text{Rp.746.299.851}} \times 100\% = 32,24\%$$